



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/02/X/1997, tertanggal 1 Oktober 1997 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Provinsi DKI Jakarta, kemudian

Halaman 1 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat merantau serta berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Sejak bulan Agustus tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Penggugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di tempat usaha Tergugat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang ;

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) **Anak I Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Desember 1998 ;
- 2) **Anak II Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pariaman, pada tanggal 23 April 2000 ;
- 3) **Anak III Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pariaman, pada tanggal 08 Agustus 2006 ;
- 4) **Anak IV Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pariaman, pada tanggal 27 Juli 2010, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan ekonomi yang kurang tercukupi, sebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sehingga kebutuhan rumah tangga sulit terpenuhi ;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga

Halaman 2 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Agustus 2018, yang disebabkan Penggugat curiga dengan Tergugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain di belakang Penggugat, sebab Penggugat telah 2 kali bertemu dengan wanita tersebut, mengenai hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, beberapa hari kemudian Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, upaya damai telah dilakukan dengan cara

Halaman 3 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Penggugat diakui, Tergugat tidak hadir atau Tergugat hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/02/X/1997, tertanggal 01 Oktober 1997 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan telah di-nazegelen (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
    - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
    - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4(empat) orang anak;
    - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Provinsi DKI Jakarta, kemudian antara Penggugat dan Tergugat merantau serta berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah

Halaman 4 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;

- bahwa setahu saya sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi yang kurang tercukupi, sebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sehingga kebutuhan rumah tangga sulit terpenuhi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2018 yang lalu;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan. Untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan

Majelis Hakim ;

2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4(empat) orang anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Provinsi DKI Jakarta, kemudian antara Penggugat dan Tergugat merantau serta berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;

Halaman 5 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saya sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi yang kurang tercukupi, sebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sehingga kebutuhan rumah tangga sulit terpenuhi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2018 yang lalu;
- bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan.

Untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan Majelis Hakim ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya damai dilakukan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3

Halaman 6 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016, perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga pemeriksaan tetap harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والقضا على غيب عن البلد اوعن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدع حجة  
Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau

Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah* (*l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, selanjutnya dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/02/X/1997, tertanggal 01 Oktober 1997 (P), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan telah di-*nazegelen* (dibubuhi meterai cukup dan dicap pos);
- b. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
  1. Saksi I dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
    - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
    - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai sepupu Penggugat;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
    - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4(empat) orang anak;
    - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Provinsi DKI Jakarta, kemudian antara Penggugat dan Tergugat merantau serta berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
    - bahwa setahu saya sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran;
  - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
  - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi yang kurang tercukupi, sebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sehingga kebutuhan rumah tangga sulit terpenuhi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2018 yang lalu;
  - bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan. Untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan Majelis Hakim ;
2. Saksi II dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4(empat) orang anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Provinsi DKI Jakarta, kemudian antara Penggugat dan Tergugat merantau serta berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
  - bahwa setahu saya sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi yang kurang tercukupi, sebab Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sehingga kebutuhan rumah tangga sulit terpenuhi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2018 yang lalu;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan. Untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya terutama mengenai hal-hal :
  - Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai
  - Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2018 yang lalu;
  - Sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan bukti surat yaitu (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat pernah bercerai dengan Tergugat sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2(dua)tahun berturut-turut dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 11 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
5. bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (Ghoyatul Marom);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, perlu diberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;

Halaman 12 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berpekar secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan penetapan Nomor : W. 28-A1/1007/HK.05/IX/2020, tanggal 07 September 2020, maka biaya ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2020;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 13 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2020 sejumlah Rp.306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.HI., dan Yustini Razak, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hermanto, S.HI.**

**Drs. Herman Supriyadi**

Hakim Anggota,

**Yustini Razak, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ritawati, S.H.**

Halaman 14 dari 15 hal.Put.no. 398/Pdt.G/2020/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNPB	: Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0,00
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)